



POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR DAN BATURAJA BARAT

Rezika Mutiara Velisa¹ Ainur Ropik² Deany Afriany³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Rezikazarkoni4@gmail.com, ainurropik_uin@rradenfatah.ac.id,

deanyafriany_uin@radenfatah.ac.id

Abstract (English)

Road infrastructure plays a crucial role in enhancing accessibility and driving economic growth in a region. However, its implementation is often influenced by political dynamics that affect decision-making, budget allocation, and policy oversight mechanisms. This study aims to analyze the governance of road infrastructure in Baturaja Timur and Baturaja Barat Districts and identify the various challenges in its implementation. Using a qualitative method with a descriptive approach, this research collects data through interviews with stakeholders, including local government officials, the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), and the local community. Regime theory is employed to understand interaction patterns and the roles of actors in road infrastructure management. The findings reveal that road management in these areas faces several obstacles, such as budget constraints, weak project oversight, and political influence in determining development priorities. Road damage due to the high load of heavy vehicles and inadequate maintenance also contributes to an increase in accidents and disruptions to community activities. This study highlights the importance of collaboration between the government, private sector, and society in improving the effectiveness of road infrastructure governance. Transparency in planning and budgeting processes, along with increased community involvement in policy oversight, are key factors to ensuring that road infrastructure development remains sustainable and meets the needs of the public.

Article History

Submitted: 25 Februari 2025

Accepted: 4 Maret 2025

Published: 5 Maret 2025

Key Words

Infrastructure Governance, Infrastructure Politics, Regime, Baturaja Timur, Baturaja Barat.

Abstrak (Indonesia)

Infrastruktur jalan memiliki peran krusial dalam meningkatkan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan infrastruktur jalan kerap dipengaruhi oleh dinamika politik yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta mekanisme pengawasan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta masyarakat setempat. Teori rezim digunakan untuk memahami pola interaksi serta peran aktor dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan jalan di wilayah tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan proyek, serta pengaruh kepentingan politik dalam menentukan prioritas pembangunan. Kerusakan jalan akibat tingginya beban kendaraan berat serta minimnya perawatan turut berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan dan terganggunya aktivitas masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola infrastruktur jalan. Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran

Sejarah Artikel

Submitted: 25 Februari 2025

Accepted: 4 Maret 2025

Published: 5 Maret 2025

Kata Kunci

Tata Kelola Infrastruktur, Politik Infrastruktur, Rezim, Baturaja Timur, Baturaja Barat.



serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi faktor kunci agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik berkontribusi terhadap kelancaran transportasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup penduduk setempat. Namun, dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, terutama dalam hal penganggaran, prioritas pembangunan, serta pengawasan proyek.

Di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat, pengelolaan infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti buruknya kondisi jalan, keterbatasan anggaran, serta pengaruh kepentingan politik. Pemerintah daerah, melalui Dinas PUPR, bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat, serta mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan.

Setelah menguraikan pentingnya infrastruktur jalan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, perlu dipahami bahwa aspek tata kelola infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan administratif, tetapi juga erat dengan dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Dalam konteks Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat, kebijakan pembangunan jalan tidak dapat dilepaskan dari peran aktor-aktor yang terlibat, baik dari pihak pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang sering dikemukakan oleh pemerintah daerah sebagai hambatan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, dalam banyak kasus, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan efektivitas perencanaan dan pengalokasian dana yang terkadang lebih mengutamakan proyek-proyek strategis yang memiliki kepentingan politik tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari arena politik yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah.

Lebih lanjut, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan infrastruktur turut memperburuk kualitas tata kelola jalan. Minimnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur sering kali menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai bagaimana dan untuk apa anggaran infrastruktur dialokasikan. Akibatnya, keluhan terkait buruknya kondisi jalan sering kali muncul tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Dengan memahami berbagai tantangan ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai kondisi faktual infrastruktur jalan di wilayah tersebut, tetapi juga mengungkap bagaimana interaksi antara kebijakan, kepentingan politik, serta partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan jalan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola infrastruktur jalan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Dinas PUPR, serta masyarakat yang terdampak oleh kondisi jalan di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi: Mengamati langsung kondisi jalan dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
2. Wawancara: Dilakukan dengan pejabat pemerintah, staf Dinas PUPR, serta masyarakat yang sering menggunakan jalan tersebut.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder dari laporan pemerintah, regulasi terkait, serta berita yang membahas infrastruktur jalan di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada kualitas serta ketahanan jalan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pejabat terkait serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa banyak proyek jalan mengalami keterlambatan pengerjaan, kualitas konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Beberapa ruas jalan utama di wilayah ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan Cor Beton Batu Kuning, misalnya, ditemukan banyak lubang besar serta retakan yang membahayakan pengguna jalan. Jalan Lintas Sumatera KM 6 juga memiliki permukaan jalan yang tidak rata dan sering tergenang air saat hujan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor penyebab utama dari kerusakan jalan ini adalah tingginya volume kendaraan berat, minimnya sistem drainase yang memadai, serta kurangnya perawatan rutin dari pemerintah daerah.

Dampak dari buruknya kondisi jalan ini cukup signifikan bagi masyarakat. Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam aksesibilitas, terutama bagi mereka yang bekerja atau bersekolah di luar wilayah kecamatan. Selain itu, kondisi jalan yang tidak layak juga menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Dari segi ekonomi, infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Terkait implementasi kebijakan tata kelola infrastruktur jalan, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pertama, perencanaan pembangunan jalan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan beban lalu lintas, sehingga infrastruktur yang dibangun tidak bertahan lama. Kedua, keterbatasan anggaran dan pengalokasian dana yang tidak efektif menjadi faktor penghambat utama dalam perbaikan dan pembangunan jalan. Dalam beberapa kasus, anggaran proyek lebih banyak diarahkan pada proyek yang memiliki kepentingan politik tertentu. Ketiga, lemahnya sistem pengawasan menyebabkan hasil pembangunan jalan tidak sesuai standar teknis yang ditetapkan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek masih sangat minim, sehingga sulit untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor



struktural, politik, dan teknis. Secara struktural, lemahnya implementasi regulasi serta koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah daerah dan Dinas PUPR menyebabkan banyak proyek jalan yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan jalan sering kali tidak diterapkan dengan baik, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Dari sisi politik, pengaruh kepentingan tertentu dalam penentuan prioritas pembangunan jalan terlihat jelas. Proyek-proyek yang mendapatkan anggaran besar sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik lokal, di mana proyek pembangunan jalan digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu. Selain itu, proses tender dalam pemilihan kontraktor sering kali tidak transparan dan sarat dengan praktik korupsi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

Pemerintah daerah masih kekurangan tenaga ahli yang mampu merencanakan serta mengelola proyek jalan secara efektif. Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam bidang infrastruktur juga memperburuk situasi, sehingga banyak proyek yang tidak sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam permasalahan ini. Pemerintah daerah belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek jalan. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan jalan atau penyimpangan dalam proyek, masyarakat kesulitan dalam menyampaikan keluhan atau menuntut akuntabilitas dari pihak terkait.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan tata kelola infrastruktur jalan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, transparansi dalam pengelolaan proyek harus diperkuat dengan membuka akses informasi mengenai perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan proyek kepada masyarakat. Kedua, pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan harus lebih ketat, baik melalui lembaga independen maupun partisipasi aktif masyarakat, guna memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ketiga, optimalisasi pemeliharaan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan rutin jalan agar tidak menunggu hingga kerusakan menjadi parah sebelum dilakukan perbaikan. Keempat, reformasi kebijakan dalam tata kelola infrastruktur diperlukan untuk meminimalkan pengaruh politik dalam penentuan prioritas pembangunan jalan serta mencegah praktik korupsi dalam proses tender dan pengelolaan anggaran proyek.

Dengan penerapan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, diharapkan tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat dapat ditingkatkan secara signifikan. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan proyek, serta pengaruh kepentingan politik dalam pembangunan. Kerusakan jalan akibat tingginya beban kendaraan dan minimnya perawatan berdampak pada aksesibilitas, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan proyek, serta peningkatan partisipasi masyarakat.



Dengan kebijakan yang lebih akuntabel dan berbasis kebutuhan publik, diharapkan infrastruktur jalan dapat dikelola lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, H. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Nagari Muaro Paiti, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur. 1–60.
- Afiatun. (2016). Politik Tata Kelola Infrastruktur.
- Dimasyahputra, A. S. (2021). Kualitas Pelayanan Jalan Tol (Studi Kasus: Jalan Tol Soroja). Skripsi, 3(April), 49–58.
- Hidayat, A., & Putra, S. G. (2018). Kajian Kondisi Infrastruktur Jalan Lingkungan Di Kawasan Kelurahan 3-4 Ulu Palembang. Jurnal Teknik Sipil, 8(2), 57–67. <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v8i2.5>
- Juainah, N., Izomiddin, & Rahmawati, P. (2024). Politik Tata Kelola Dalam Pengembangan Wilayah. Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10(February), 67–76.
- Kasus, S., Jalan, R., Sta, S. T. A., Lalamentik, L. G. J., & Waani, J. E. (2020). Analisa Kerusakan Jalan Dan Penanganannya Dengan Metode Pci (Pavement Condition Index). 8(4), 645–654.
- Kebijakan, I., Jalan, P., Di, K., & Kediri, K. (n.d.). Retno W. S., Suyeno, Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan ««« | 12. 12–25.
- Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, & Maulida Putri Rahmawati. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN LANGENHARJO DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 346–361. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3112>
- Marsyanda, A. U., Januar, I. Y. D., Said, L. B., Idrus, Y., & Alkam, R. B. (2022). Analisis Kerusakan Jalan dan Cara Penanggulangannya. Jurnal Teknik Sipil MACCA, 7(1), 8–17. <https://doi.org/10.33096/jtsm.v7i1.536>
- Niron, E. S. (2020). Kontestasi Politik Tata Kelola Ruang Di Kota Kupang. <http://repository.unair.ac.id/105270/>
- Nugroho, A., Nurmandi, A., Suranto, S., & Salahudin, S. (2020). Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia. Journal of Government and Civil Society. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2301>
- Pambudi, A. S., Hidayati, S., Pramujio, B., Pemantauan, D., Daerah, P., Pembangunan, P., Bappenas, N., Bappenas, G., Jl, L., Said, H. R. R., Selatan, J., Jakarta, D. K. I., Wilayah, B., Kalimantan, S., Selor, V. T., Pekerjaan, K., Rakyat, P., Kalimantan, B. W. S., Selor, V. T., ... Utara, K. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat penunjang pertumbuhan dan produktivitas produksi , jasa sampai pengembangan persaingan ,. 7(2).
- Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang Luthfi Eko Nugroho, D. M., & Hari Mardiansjah, F. (2016). Pemuda 148 Semarang Kontak Penulis : mluthfi@semarangkota.go.id 2 Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota. Biro Penerbit Planologi Undip, 12(4), 400–417.
- Rossietta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (2020). Modul 2 Prinsip-Prinsip dan Penerapan Tata Kelola Entitas Sektor Publik. Universitas Terbuka, 1–27.



- Santiyasa, I. G., Hermawati, P., & Intara, I. W. (2023). Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Dan Biaya Perbaikan Pada Perkerasan Lentur Jalan Nangka Utara–Jalan Antasura, Denpasar. Prosiding Seminar Nasional
<https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/senasketekniksipilan/article/view/1769>
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. Nucl. Phys., 13(1), 104–116.
- Udiana I. (2014). Analisis Faktor Penyebab Kerusakan jalan. Jurnal Teknik Sipil, 3(1), 13–18.
- Vogel, R. K. (1997). Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States. Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States.
<https://doi.org/10.5040/9798400661501>
- Yunardhi, H. (2018). Analisa Kerusakan Jalan Dengan Metode Pci Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus : Ruas Jalan D.I. Panjaitan). Jurnal Teknologi Sipil, 2(2), 38–47.